

## **KONVERGENSI PENGELUARAN PEMERINTAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

**Achmad Solihin dan Puji Rahayu**

*Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Alumni Fakultas  
Ekonomi Universitas Airlangga*

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the convergence in local government expenditure among local governments in East Java for the periods 2000-2005. The research question in this study is whether the local governments' expenditure are convergence or not. We are applying the methodology of convergent model by analyzing the technique of Generalized Least Squares (GLS) for the pool data.*

*This study concludes there is an empirical evidence of convergence in local government expenditure among local government of East Java for the periods of 2000-2005. This finding shows how regions with lower government expenditure per-capita in 2000 grow faster than regions with higher ones. Additionally, there is competition among the region in providing public utilities and services.*

*Keywords: Convergence, Growth, Government Expenditure*

### **1. PENDAHULUAN**

Peranan pemerintah dalam perekonomian berbeda-beda sesuai dengan sistem perekonomian. Pemerintah berperan sangat dominan pada sistem perekonomian sosialis, dan berlaku sebaliknya dalam sistem perekonomian kapitalis murni (Mungkusubroto, 1999: 1). Setiap ahli ekonomi berbeda-beda dalam penilaian mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam suatu perekonomian.

Desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalam pembuatan berbagai kebijakan dan administrasi pembangunan sejak 1970-an. Perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya disebabkan oleh gagalnya perencanaan secara terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan oleh pemerintah pusat, sehingga para ahli ekonomi berpendapat bahwa desentralisasi sangat penting dalam perencanaan dan administrasi di negara dunia ketiga.

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal, yang meliputi aspek penerimaan dan pengeluaran. Desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintahan daerah sebagai penyedia barang dan jasa pelayanan kepada